



Kantong Belanjaan Tak Lagi Gratis

Pemkot Uji Cobakan Plastik Berbayar di Toko Ritel dan Toko Besar Modern

YOGYA, TRIBUN - Upaya pemerintah mengurangi pemakaian plastik mulai genar digabung-gabungkan. Satu di antaranya dengan Surat Edaran (SE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH-K) yang menerapkan plastik berbayar pada ritel atau toko besar modern.

Merujuk kepada Surat Edaran (SE) yang diterbitkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 21 Februari 2015 silam, kebijakan tersebut bakal diterapkan di 22 kota, termasuk Kota Yogyakarta.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta, Suyana, mengatakan, pihaknya telah berkomitmen untuk dapat menerapkan kebijakan plastik berbayar

ini di Kota Yogyakarta. Ia mengatakan, untuk tahapan awal, akan dilaksanakan survei terkait harga plastik yang rencananya dibebankan kepada masyarakat. Hal itu untuk mendukung mengetahui jika kebijakan ini diterapkan.

"Hingga saat ini kita baru mensurvei, berapa sih harga-harga yang layak untuk itu (plastik berbayar)," ujar Suyana, Kamis (11/2).

Suyana melanjutkan, setelah dilakukan survei, pihaknya akan meminta Surat Edaran Wali Kota terkait kebijakan plastik berbayar. Selanjutnya, melakukan sosialisasi awal kepada masyarakat terkait kebijakan baru plastik berbayar kepada masyarakat.

Ia mengatakan, pada tahapan awal, pihaknya akan menerapkannya pada ritel atau toko-toko besar modern yang cakupannya pemakaian plastik cukup besar. Selanjutnya akan diterapkan bertahap.

"Kita siapkan Surat Edaran Wali Kota, untuk menyelesaikan lebih dahulu kebijakan baru ini. Nanti terutama akan membidik ritel atau toko besar modern

• ke halaman 14

BEBAS PLASTIK

- 1 SE Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatur kebijakan plastik berbayar pada ritel
- 2 BLH menyatakan komitmennya dalam menerapkan kebijakan plastik berbayar di Kota Yogyakarta
- 3 Di tahap awal akan dilaksanakan survei terkait harga plastik yang dibebankan kepada masyarakat
- 4 Setelah survei ia akan meminta Surat Edaran Wali Kota terkait kebijakan plastik berbayar
- 5 Selanjutnya dilakukan sosialisasi awal kepada masyarakat terkait kebijakan baru plastik berbayar
- 6 Penggunaan tas plastik, termasuk di tempat belanja di Kota Yogyakarta cukup diperhatikan
- 7 Selanjutnya produsen bertanggung jawab terhadap sampah plastik yang dibebankan ke konsumen

Ttd

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005

Kantong Belanjaan Tak Lagi Gratis

• Sambungan Hal 13

yang pemakaian plastik cukup besar," ujar Suyana.

Suyana tak bisa menghitung jumlah produksi sampah plastik di Kota Yogyakarta, karena tidak ada pihak yang mau mengangkut sampah-sampah plastik jadi pot, menjadi tali plastik. "Nanti upaya itu harus bisa memundakan," ujar Suyana.

Tanggung jawab produsen

Sebetulnya, ia kurang setuju dengan kebijakan plastik berbayar ini. Ia lebih menyayangkan kepada produsen yang menggunakan plastik pembungkusan untuk produknya tanpa tanggung

tersebut. Ia mencontohkan, produksi sampah plastik untuk bungkus mi instan saja bisa mencapai 15 juta bungkus, yang menyumbang sampah cukup besar.

"Penggunaan plastik cukup memperhatikan di masyarakat. Memang kami BLH sudah melakukan pengelolaan di TPA, dengan di recycle dari plastik kosmetik menjadi plastik ember, menjadi pot, menjadi tali plastik. Nanti upaya itu harus bisa memundakan," ujar Suyana.

"Mestinya itu (toko, Rest) yang tanggung jawab, penghasil sampah yang bertanggung jawab ke sampahnya. Kebijakan masyarakat yang harus membayar itu tidak pas, sebenarnya ya mereka yang membuat bungkus plastik," tegasnya. (rlk)

indak Lanjut

tuk Ditanggapi

tuk Diketahui

mpa Pers

.....

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005